

Berita	: Apdesi Nilai Terlalu Berlebihan
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Tribun Jabar/Hal.9
Edisi	: Kamis, 26 Oktober 2017

# Apdesi Nilai Terlalu Berlebihan

## ■ Penggunaan Dana Desa Diawasi Polisi

**SOREANG, TRIBUN** - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung merasa kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pengawasan penggunaan dana desa (DD) oleh kapolsek dan bhabinkamtibmas terlalu berlebihan.

Pasalnya, tanpa ada pengawasan dari polisi, penggunaan DD sudah diawasi banyak pihak dan dinilai cukup. Saat ini pengawasan dilakukan oleh auditor dari Inspektorat di tingkat pemerintahan kabupaten, Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan, dan masyarakat.

Sekretaris Apdesi Kabupaten Bandung, Hilman Yusuf, heran dengan langkah presiden yang menyorot penggunaan DD yang nilainya tak lebih dari Rp 2 miliar itu. Menurutnya, sebaiknya presiden lebih ketat mengawasi penggunaan anggaran di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dibandingkan dengan DD, ujar Hilman, pejabat setingkat kepala bidang dan kepala

seksi di tingkat kabupaten bisa menggunakan anggaran lebih dari Rp 20 miliar, berikut pendampingan dari konsultan ahli.

"Sedangkan desa, kata Hilman, selain anggarannya kecil, tak ada konsultan ahli yang mendampingi. Adapun sarjana pendamping, rata-rata tak sesuai dengan bidang keilmuannya.

Sebagai contoh sarjana sastra dijadikan pendamping untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Hilman. Karena ketidaktahuan bisa jadi seorang kepala desa membuat infrastruktur yang tidak sesuai dengan poros penggunaan DD.

"Apalagi sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan desa itu terbatas atau kemampuannya beragam, jadi pendistribusian DD itu seperti sebuah jebakan yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk para kepala desa di seluruh Indonesia," kata Hilman di Soreang, Rabu, (25/10).

Hilman menambahkan, gaji yang diterima kepala desa hanya berkisar di angka Rp 3 juta rupiah per bulan. Sedangkan gaji perangkat

desa masih di bawah UMR dan dibayarkan setelah anggaran cair.

Di tengah keterbatasan itu, aparat desa pun dibebankan dengan beban pekerjaan yang berat. Kendati demikian, Hilman tak kontra bila polisi melakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran. Asalkan, penindakan itu dilakukan setelah mendapatkan temuan dari auditor inspektorat dan BPK.

"Bukan pengawasan melekat seperti sekarang ini," katanya.

Selama ini berbagai anggaran yang diterima oleh desa itu harus dipotong pajak pertambahan nilai (PPN). Padahal, berbagai barang yang telah dibelanjakan oleh pihak desa pun telah dikenakan pajak. Ini berarti terjadi *double account* yang membuat DD yang diterima desa semakin kecil jumlahnya.

"Sebenarnya kami bersyukur dengan adanya DD ini, namun kalau seperti ini malah menjadi jebakan untuk kami. Kalau begitu lebih baik kami tolak saja itu DD, toh tanpa ada itu juga pemerintahan desa bisa tetap jalan kok," katanya. (dam)